

**EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2023-2024**

Oleh: Firma Wahyudi

Pembimbing: Dr. Auradian Marta, S.I.P., MA.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pengelolaan sampah menjadi isu lingkungan krusial. Kota Pekanbaru tercatat sebagai daerah timbunan sampah tertinggi di Provinsi Riau sebesar 1.011,01 ton per hari. Peningkatan ini dipicu oleh pertumbuhan penduduk serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru merespons melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan hingga pembuangan akhir. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kebijakan belum optimal akibat keterbatasan anggaran, sarana-prasarana, dan partisipasi masyarakat, perlu adanya evaluasi atas kebijakan yang sudah ditetapkan. Disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Pekanbaru masih menghadapi hambatan struktural dan teknis, sehingga diperlukan evaluasi kebijakan, penegakan sanksi, dan peningkatan kolaborasi lintas pihak untuk mewujudkan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: pengelolaan sampah, kebijakan publik, evaluasi

ABSTRACT

Waste management has become a crucial environmental issue. Pekanbaru City records the highest waste generation in Riau Province, reaching 1,011.01 tons per day. This increase is driven by population growth and the low level of public awareness and participation. The Pekanbaru City Government has responded by issuing Regional Regulation No. 08 of 2014 on Waste Management. This study aims to evaluate the implementation of the waste management policy, covering the stages of collection, transportation, processing, and final disposal. The findings indicate that policy implementation remains suboptimal due to limited budgets, inadequate infrastructure, and low community participation, highlighting the need for policy evaluation. It is concluded that waste management in Pekanbaru still faces structural and technical barriers; therefore, policy review, enforcement of sanctions, and enhanced cross-sector collaboration are required to achieve effective and sustainable waste management.

Keywords: waste management, public policy, evaluation

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang semakin kompleks dan mendesak di wilayah perkotaan. Kota Pekanbaru, sebagai ibu kota Provinsi Riau dan pusat kegiatan ekonomi serta pertumbuhan penduduk yang pesat, menghadapi tantangan besar dalam mengelola timbulan sampah yang terus meningkat. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, volume sampah mencapai lebih dari 1.000 ton per hari, menjadikan Pekanbaru sebagai kota dengan timbulan sampah tertinggi di Provinsi Riau. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah, serta keterbatasan fasilitas pengelolaan yang memadai. Akibatnya, berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran, penurunan estetika kota, dan gangguan kesehatan masyarakat tidak dapat dihindari.

Sebagai upaya penanganan, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan

dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha. Namun, meskipun kebijakan ini telah berjalan selama beberapa tahun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan sampah belum tertangani secara optimal. Banyaknya tempat pembuangan sampah ilegal, keterbatasan sarana transportasi, serta lemahnya koordinasi antar instansi menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di tingkat praktis.

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 telah berjalan efektif dalam mengatasi persoalan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan. Dengan kata lain, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan: Apakah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru sudah efektif dan sesuai dengan tujuan kebijakan yang diharapkan?

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dengan

menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik. Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya serta mengungkap faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu bagaimana Evaluasi dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah ?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode

deskriptif evaluatif untuk menilai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggambarkan secara mendalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kendala implementasinya.

Objek penelitian adalah pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Kota Pekanbaru, sedangkan subjek penelitian meliputi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses tersebut, seperti pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), anggota DPRD Kota Pekanbaru, aparat kecamatan, dan perwakilan masyarakat di sekitar titik-titik pembuangan sampah. Informan dipilih secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap implementasi kebijakan.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap berbagai sumber terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu

dengan mengorganisasi, menginterpretasi, dan menyimpulkan informasi berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan publik yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil analisis digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru telah berjalan sesuai tujuan dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk implementasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas

Efektivitas pelaksanaan Perda No. 08 Tahun 2014 masih tergolong rendah. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru tahun 2024, volume sampah harian mencapai 1.011,01 ton, sementara kemampuan pengangkutan hanya sekitar 750–800 ton per hari. Artinya, sekitar 20–25% sampah tidak terangkut secara optimal, mengakibatkan penumpukan di beberapa titik pembuangan sementara. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan belum efektif dalam mengurangi timbulan sampah maupun menjaga kebersihan kota. Meskipun regulasi sudah diterapkan hampir satu dekade, belum terlihat perubahan signifikan

terhadap kondisi kebersihan dan pengelolaan sampah secara menyeluruh. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru masih menghadapi tantangan yang kompleks, baik pada dimensi teknis, kelembagaan, maupun sosial. Oleh sebab itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas operasional, penguatan koordinasi antar level pemerintahan, inovasi dalam metode pengolahan, serta pendekatan partisipatif yang lebih intensif untuk mewujudkan tujuan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan.

2. Efisiensi

Dari aspek efisiensi, kebijakan pengelolaan sampah di Pekanbaru terkendala oleh keterbatasan anggaran dan sarana operasional. Armada pengangkut yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah timbulan sampah harian, sementara biaya operasional tinggi akibat luasnya wilayah pengangkutan. Selain itu, sistem pengelolaan masih berorientasi pada *end of pipe* (pengangkutan dan pembuangan akhir), bukan pada pengurangan di sumber. Hal ini menyebabkan penggunaan sumber daya manusia, waktu, dan dana belum efisien. Tanpa manajemen logistik dan pembiayaan

yang lebih baik, efektivitas kebijakan sulit tercapai secara optimal. Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru masih menghadapi tantangan serius dalam hal efisiensi. Besarnya anggaran yang dialokasikan belum mampu menghasilkan output yang maksimal, baik dari sisi pengurangan timbulan sampah maupun peningkatan kualitas layanan. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan strategi implementasi, optimalisasi penggunaan anggaran, serta penguatan partisipasi masyarakat agar efisiensi kebijakan ini dapat tercapai secara nyata.

3. Kecukupan

Dari sisi kecukupan, kebijakan ini belum mampu menjawab seluruh permasalahan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Fasilitas TPS dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih terbatas dan belum tersebar merata di semua kecamatan. Beberapa wilayah pinggiran, seperti Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya, masih menghadapi kekurangan sarana pembuangan resmi, sehingga muncul TPS ilegal. Program pengurangan sampah di sumber melalui kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) juga belum berjalan maksimal karena minimnya dukungan infrastruktur dan edukasi masyarakat. Dengan demikian,

kapasitas kebijakan belum cukup untuk mengatasi masalah secara menyeluruh.

4. Pemerataan (Equity)

Dalam konteks ini, evaluasi terhadap aspek pemerataan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu saja, melainkan memberikan dampak yang adil dan proporsional kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang baik seharusnya memperhatikan aspek distribusi secara menyeluruh, agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial atau ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Aspek pemerataan menunjukkan ketimpangan antara wilayah pusat dan pinggiran dalam layanan kebersihan. Kecamatan pusat kota seperti Pekanbaru Kota dan Sukajadi memperoleh layanan pengangkutan yang lebih rutin dibanding wilayah pinggiran. Selain itu, pembagian armada, petugas, dan sarana pengelolaan sampah belum proporsional terhadap volume timbulan di masing-masing kecamatan. Ketimpangan ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam tingkat kebersihan antarwilayah, sehingga kebijakan belum adil dan merata bagi seluruh masyarakat kota.

5. Responsivitas

Tingkat responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat masih rendah. Sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah dan penerapan prinsip 3R belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar warga belum memahami kewajiban memilah sampah atau mengikuti program *bank sampah*. Rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya saluran komunikasi antara DLHK dan warga membuat kebijakan belum sepenuhnya menjawab harapan publik. Pemerintah daerah dinilai lebih fokus pada aspek teknis pengangkutan dibanding pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Berdasarkan temuan pada kriteria responsivitas, dapat dipahami bahwa pemerintah daerah perlu membangun sebuah platform khusus yang berfungsi sebagai saluran resmi pengaduan masyarakat terkait pengelolaan sampah. Platform ini hendaknya dirancang secara terintegrasi, mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, dan memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas. Keberadaannya akan memungkinkan pemerintah menerima aduan secara lebih masif dan sistematis, sehingga dapat dijadikan dasar evaluasi kebijakan sekaligus bahan perbaikan dalam

pelaksanaan program pengelolaan sampah. Selain itu, fasilitas ini juga akan mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun saran secara langsung tanpa harus bergantung pada jalur komunikasi informal, seperti media sosial, yang kerap kali tidak terpantau secara maksimal. Dengan demikian, penyediaan platform pengaduan resmi tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dua arah, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas kebijakan pengelolaan sampah.

6. Ketepatan

Dari aspek ketepatan, kebijakan sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, implementasinya belum tepat sasaran karena pelaksanaannya belum disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas daerah. Misalnya, strategi pengelolaan masih bersifat seragam untuk seluruh wilayah tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi demografis dan geografis antar kecamatan. Selain itu, belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang terukur

menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak dapat dipantau secara konsisten. Dengan demikian, meskipun secara normatif kebijakan sudah relevan, penerapannya belum tepat dalam konteks kebutuhan lokal Pekanbaru.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan secara optimal. Berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan anggaran, minimnya sarana prasarana seperti TPS dan armada pengangkut, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan ini belum sepenuhnya mencapai tujuannya dalam menciptakan lingkungan kota yang bersih dan sehat.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh

koordinasi kelembagaan, dukungan sumber daya, dan partisipasi masyarakat. Secara praktis, temuan ini menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme implementasi perda, termasuk peningkatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis partisipatif. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup lokasi dan jumlah informan yang terbatas, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas kebijakan serupa di daerah lain atau mengintegrasikan pendekatan kuantitatif guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja kebijakan pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. In *Gadjah Mada Universitas Press* (pp. 1–710). Gadjah Mada University Press.
- Hermansyah, H. (2020). *Evaluasi kebijakan publik*. Jakarta: Penerbit In Media.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Bandung: Bildung.
- Nugroho, R. (2018). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Yogyakarta: Jejak Pustaka.

- Sulistyo, U. (2019). *Buku Ajar Metode Kualitatif*. Jambi: Salim Media Indonesia.
- Thomas R. Dye. (2017). *Understanding Public Policy*. Florida: Florida State University.
- Afriyanni, A. (2022). Kinerja Pengelolaan Persampahan di Kota Pekanbaru. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 10(01), 85–98. <https://doi.org/10.35450/jip.v10i01.281>
- Bahrudin, E. (2019). Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. *Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia*, 6, 126135.
- Dwiwarman, D. A. (2021). The evaluation of Regional Medium Term Development Plan Policy of Cianjur regency. *Journal PINISI*, 3.
- Hajarah, M. (2019). Pohon Teori Evaluasi Kebijakan Dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). *Jurnal Foundasia*, 9(1), 27–42. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v9i1.26149>
- Isril, Febrina, R., & Harirah, Z. (2019). Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(1), 60. <https://doi.org/10.35967/jipn.v17i1.7059>
- Kurniawan, D. A., & Santoso, A. Z. (2020). Pengelolaan sampah di daerah sepetan kabupaten tangerang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31–36.
- Putri, Z. A., & Purnamasari, H. (2025). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karawang: Perspektif Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 6(2), 114–126.
- Rahmani, N. U. (2024). Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Sampah. *Andalas*.
- Ramadhana, P. A., & Jumansyah. (2024). Evaluasi Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah. *Journal Pemerintahan Integratif*, 11(2), 197–206.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rusadi, S., & Setiawan, W. (2022). Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(1), 1–9. [https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7\(1\).6446](https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7(1).6446)
- Subekti, S. (2010). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat. *Fakultas Teknik UNPAND*, 24–30. http://www.unwahas.ac.id/publikasiilmiah/index.php/PROSIDING_SNST_FT/article/download/326/411
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Torang Hadomuan, M., & WD Tuti, R. (2022). Evaluasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan Dan Timbulan Di Kota Tangerang Selatan. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(Vol. 13 No. 1), 7–14. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.4504>
- Yati, I., Trilestari, E. W., Sufianti, E., Mochtar, S., Gedeona, H. T., & Sugiharti, D. (2021). Evaluasi

Pelaksanaan Kebijakan Program
Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di
Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus

Di Desa Cikadu Kecamatan
Cibatu). *Kebijakan: Jurnal Ilmu
Administrasi*, 12(2), 83-96.